



Renja 2022

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KOMUNIKAS DAN INFORMATIKA
KOTA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

Renja Tahun 2022 ini menguraikan tentang Rancangan Awal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2022 berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2022. Selain itu, Rencana Kerja ini juga berlandaskan pada kebijakan nasional tentang percepatan transformasi digital nasional, penguatan ketahanan dan keamanan siber, serta satu data Indonesia.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. menjadi semakin krusial. Pada era new normal, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan dan merujuk pada Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Sombere' dan Smart City" dengan Imunitas Kuat untuk Semua, Revolusi SDM serta Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik kelas Dunia bersih dari Indikasi Korupsi serta program multi inovasi yaitu Makassar Recover yang merupakan salah satu program kerja kota Makassar untuk didedikasikan sebagai program gebrakan baru yang terintegrasi dalam data dan berbasis teknologi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 ini.

Makassar, Oktober 2021

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Makassar**



Denny Hidayat
Pangkat: Pembina
Nip.: 19750505 200003 1 009

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022 | 9 |
| 2.1 Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022..... | 9 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.... | 22 |
| 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 25 |
| 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 30 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 32 |
| 3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika..... | 32 |
| 3.2 Telaahan Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)..... | 34 |
| 3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (BPS)..... | 36 |
| 3.4 Tujuan dan Sasaran Renja RKPD | 38 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 41 |
| 4.1 Rencana Kerja | 41 |
| 4.2 Pendanaan Perangkat Daerah | 45 |
| BAB V PENUTUP..... | 50 |
| 5.1 Catatan Ketersediaan Anggaran | 50 |
| 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan | 50 |
| 5.3 Rencana Tindak Lanjut..... | 50 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar | 26 |
| Tabel T-C.32 Usulan Kelurahan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2022 | 31 |
| Tabel T-C.25 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar | 39 |
| Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022..... | 45 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dilaksanakan mengambil peran penting dalam suatu organisasi. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja tahunan ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yang nantinya merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja dan Perubahan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja (Renja) semula ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, dan aspirasi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembantuan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas – batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten – Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

- Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentuykan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Naegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
29. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 33);
30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makssar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah kota Makassar Nomor 8 Tahun 2015);
32. Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021);
34. Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 60).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja ini, adalah :

- Untuk memberikan arahan bagi dimensi kebijakan dan program kerja tahunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pengelolaan pembangunan khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
- Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dalam rangka Menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan.

- Untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar selama 1 (satu) tahun.
- Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang penyusunan Rencana Kerja, landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja, penjelasan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika bahasan tiap bab.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini mendeskripsikan kedudukan program dan kegiatan tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan SKPD, review tentang Rancangan Awal RKPD serta penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD serta penyajian mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dan penjelasan Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tabel program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2021

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan pada tahun 2021

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022

Selama tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah melaksanakan 5 Program (10 Kegiatan) terdiri dari 1 program penunjang/pendukung 6 Kegiatan dan 4 program utama 4 Kegiatan. Adapun total rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II adalah 23% dengan serapan anggaran sebesar Rp.10.324.950.993,- atau 23% dari pagu sebesar Rp.39.793.121.100,-

Secara umum, tidak terdapat kendala yang berarti dalam pencapaian kinerja tersebut, keterlambatan pelaksanaan kegiatan disebabkan karena rata-rata target kegiatan berada pada triwulan berikutnya setelah adanya penyesuaian dan perubahan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Secara rinci, penjelasan capaian target kinerja dan penyebab untuk masing-masing program diuraikan sebagai berikut:

a. Program utama

1) Program Informasi dan Komunikasi Publik,

Program ini mempunyai 6 indikator kinerja program yaitu :

- a. Penyediaan kebijakan teknis informasi dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 kebijakan dari target 6 kebijakan atau dengan tingkat capaian sebesar 0%.
- b. Jumlah kegiatan pantauan aspirasi publik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 6 Data dari target 12 Data atau dengan tingkat capaian sebesar 50%.
- c. Jumlah data yang terupload dengan realisasi capaian kinerja sebesar 6 Bulan dari target 12 Bulan atau dengan tingkat capaian sebesar 50%.
- d. Jumlah informasi yang disebarikan kepada masyarakat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 2000 Eksemplar dari target 4800 Eksemplar atau dengan tingkat capaian sebesar 42%.

- e. Jumlah media yang menjalin kerja sama dengan realisasi capaian kinerja sebesar 10 Paket dari target 38 Paket atau dengan tingkat capaian sebesar 26%.
- f. Jumlah komunitas sumber daya kehumasan yang dikordinasikan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 6 Bulan dari target 12 Bulan atau dengan tingkat capaian sebesar 50%.

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan adalah 23% dengan predikat kinerja rendah. Program ini merealisasikan anggaran sebesar Rp. 788.213.800,- atau 23%.

Secara umum, capaian program ini tidak menemui kendala yang berarti karena meskipun di masa pandemi ini komunikasi yang efektif melalui pemanfaatan teknologi dan sosial media memberikan manfaat kepada SDM untuk bekerja lebih efektif, namun adapun faktor penghambatnya adalah terjadinya pandemic covid-19 di mana ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan sehingga dilakukan pergeseran ke kegiatan lain untuk mendukung pemulihan dan penanganan covid 19.

2) Program Aplikasi Informatika,

Program ini mempunyai 7 indikator kinerja program yaitu :

- a. Jumlah dokumen tata kelola IT dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 Dokumen dari target 4 Dokumen, atau dengan tingkat capaian 0%.
- b. Tercapainya optimalisasi layanan OP dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35% dari target 90%, atau dengan tingkat capaian 39%.
- c. Integrasi data yang terverifikasi dengan realisasi capaian kinerja sebesar 15% dari target 100%, atau dengan tingkat capaian 15%.
- d. Aplikasi yang terpublikasi dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 Aplikasi dari target 2 Aplikasi, atau dengan tingkat capaian 0%.
- e. Pembuatan regulasi yang diakomodasi dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 Regulasi dari target 1 Regulasi, atau dengan tingkat capaian 0%.
- f. Persentase layanan publik yang diselenggarakan dengan realisasi capaian kinerja 0% dari target 50%, atau dengan tingkat capaian 0%.
- g. Persentase layanan IT diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan

realisasi capaian kinerja sebesar 50% dari target 100%, atau dengan tingkat capaian sebesar 50%.

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan adalah 32% dengan predikat kinerja rendah, dengan serapan anggaran sebesar Rp. 2.546.176.632,- atau sebesar 10%.

Adapun faktor penghambat dari capaian kinerja program ini adalah:

- Adanya Wabah Covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana;
- Adanya kebutuhan akan layanan internet dalam penanganan wabah covid19;

Sementara itu terdapat faktor pendorong program ini adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup untuk menjalankan program ini;
- Mendukung percepatan Penanganan Covid-19 .

Adapun tindak lanjut untuk Renja berikutnya adalah :

- Melakukan penambahan anggaran belanja internet untuk mendukung kegiatan Posko Covid-19 dan petugas di lapangan;
- Menyediakan peralatan Video Konferensi dan CCTV Surveillance untuk setiap SKPD sebagai Langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19;
- Menyediakan aplikasi Makassar Recover dan melakukan perencanaan Makassar Virtual Economic Center (MAVEC).

3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral,

Program ini mempunyai 2 indikator kinerja program yaitu :

- a. Tersedianya data dalam bentuk profil Kota Makassar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 Dokumen dari target 1 Dokumen, atau dengan tingkat capaian 20%
- b. Tersedianya portal meta data statistik sektoral dengan realisasi capaian sebesar 0 Portal dari terget 1 Portal atau dengan tingkat capaian 28%.

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan adalah 30% dengan predikat kinerja rendah dengan serapan anggaran sebesar Rp. 105.828.060,- atau 23%.

Adapun faktor penghambat dari capaian kinerja program ini adalah:

- Terjadinya pandemi Covid-19 yang memberi dampak luar biasa yang membuat seluruh aspek kerja mengalami penghambatan, termasuk dari sistem kerja yang selama ini telah diterapkan harus mengalami perubahan;
- Kegiatan membutuhkan rentang waktu pelaksanaan dan penyelesaian yang cukup panjang sehingga tidak dapat dipaksakan untuk selesai saat triwulan I dan atau II.

Sementara itu terdapat faktor pendorong program ini adalah :

- Kerjasama yang baik dari produsen data (SKPD) dalam memberikan data yang dibutuhkan;
- Ketersediaan data yang tercukupi atau terpenuhinya data yang dibutuhkan yang akan ditampilkan pada portal integrasi data;
- Kerjasama yang baik dengan semua pihak konsultan dalam menyediakan fasilitas dan jasa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan;
- Kerjasama yang baik dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dalam menyediakan data yang dibutuhkan.

Adapun tindak lanjut untuk Renja berikutnya adalah :

- Penyesuaian terhadap sistem kerja baru di masa pandemic Covid-19 yang belum ada tanda-tanda penurunan sehingga capaian kinerja 100% dapat dicapai pada akhir tahun;
- Sinergi antar admin data pada masing-masing SKPD sebagai penyedia data harus tetap dijaga bahkan ditingkatkan;
- Seluruh produsen data (SKPD) diharapkan bekerjasama dengan baik dalam menyediakan data lebih cepat;

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai penyedia data statistik dan juga konsultan/rekanan yang memberikan fasilitas/jasa yang dibutuhkan dalam pencapaian kinerja program mampu dijaga dan lebih ditingkatkan.

4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi,

Program ini mempunyai 2 indikator kinerja program yaitu :

a. Jumlah dokumen keamanan informasi dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 Dokumen dari target 1 Dokumen, atau dengan tingkat capaian 0 %.

b. Jumlah layanan kemanan informasi, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 1 Layanan dari target 3 Layanan atau dengan tingkat capaian 33%.

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan adalah 100% dengan predikat kinerja sangat rendah dengan serapan anggaran Rp. 36.841.588,- atau 18%.

Faktor Penghambat :

- Adanya wabah Covid-19 sehingga tidak terlaksananya Sebagian besar kegiatan di Bidang Persandian, khususnya terkait kegiatan tatap muka.
- Adanya Refocusing dan realokasi Anggaran yang dialihkan untuk penanganan wabah pandemi covid-19.

Faktor pendorong :

- Melakukan koordinasi ke Provinsi dan BSSN untuk mendukung kegiatan pada bidang persandian.
- Melakukan koordinasi lingkup dinas Komunikasi dan Informatika serta SKPD terkait lainnya.

Tindak Lanjut :

- Meningkatkan penggunaan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) email Sanapati sebagai bentuk penerapan Protokol Kesehatan dengan memprioritaskan Aspek Kesehatan dan Keselamatan bagi ASN dalam aktivitas kirim terima berita pada situasi Pandemi Covid-19.
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikuti Webinar terkait Bidang Persandian.

b. Program Penunjang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai 34 indikator kinerja program yaitu:

1. Tersedianya dokumen RENJA perubahan SKPD yang disusun, dengan realisasi

capaian kinerja sebesar 0 dokumen dari target 1 dokumen, atau dengan tingkat capaian sebesar 0%.

2. Tersedianya dokumen RENJA SKPD yang disusun, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen dari target 1 Dokumen, atau tingkat capaian sebesar 100%.
3. Tersedianya dokumen RKA SKPD, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen dari target 1 Dokumen, atau tingkat capaian sebesar 100%.
4. Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 0 Dokumen dari target 1 Dokumen, atau tingkat capaian sebesar 0%.
5. Tersedianya dokumen DPA SKPD, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen dari target 1 Dokumen, atau tingkat capaian sebesar 100%.
6. Tersedianya dokumen perubahan DPA SKPD, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 0 Dokumen dari target 1 Dokumen, atau tingkat capaian sebesar 0%.
7. Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 0 Dokumen dari target 1 Dokumen, atau tingkat capaian sebesar 0%.
8. Tersedianya laporan semesteran barang milik daerah, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 0 Dokumen dari target 1 Dokumen, atau tingkat capaian sebesar 0%.
9. Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja SKPD yang disusun, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen dari target 1 Dokumen, atau tingkat capaian sebesar 100%.
10. Tersedianya Rencana Kerja SKPD yang dikendalikan dan dievaluasi, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 0 Dokumen dari target 1 Dokumen, atau tingkat capaian sebesar 0%.
11. Jumlah pegawai menerima gaji/tunjangan, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 6 Bulan dari target 12 Bulan, atau tingkat capaian sebesar 50%.
12. Jumlah jasa pengelolaan keuangan SKPD, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 7 Orang dari target 7 Orang, atau tingkat capaian sebesar 100%
13. Jumlah laporan keuangan semesteran dan laporan akhir tahun serta perhitungan penyusutan aset SKPD yang tersusun, dengan realisasi capaian

- kinerja sebanyak 2 Dokumen dari target 2 Dokumen, atau tingkat capaian sebesar 100%.
14. Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 140 Pasang dari target 145 Pasang, atau tingkat capaian sebesar 97%.
 15. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 0 Orang dari target 12 Orang, atau tingkat capaian sebesar 0%.
 16. Jumlah komputer yang diadakan, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 0 Jenis dari target 3 Jenis, atau tingkat capaian sebesar 0%.
 17. Jumlah alat kantor yang diadakan, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 0 Jenis dari target 6 Jenis, atau tingkat capaian sebesar 0%.
 18. Jumlah alat rumah tangga yang diadakan, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 0 Unit dari target 11 Unit, atau tingkat capaian sebesar 0%.
 19. Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 5 Jenis dari target 25 Jenis, atau tingkat capaian sebesar 20%.
 20. Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 1 Jenis dari target 7 Jenis, atau tingkat capaian sebesar 14%.
 21. Jumlah bahan bacaan yang tersedia, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 2 Jenis dari target 4 Jenis, atau tingkat capaian sebesar 50%.
 22. Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 2 kali dari target 62 kali, atau tingkat capaian sebesar 3%.
 23. Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tersedia, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 750 Surat dari target 1000 Surat, atau tingkat capaian sebesar 75%.
 24. Terhubungnya jasa pengiriman surat, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 6 Bulan dari target 12 Bulan, atau tingkat capaian sebesar 50%.
 25. Jumlah kebutuhan jasa listrik, telepon, dan air yang tersedia, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 3 Jenis dari target 3 Jenis, atau tingkat capaian sebesar 100%.

26. Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 4 Jenis dari target 4 Jenis, atau tingkat capaian sebesar 100%.
27. Jumlah mobil jabatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 1 Unit dari target 1 Unit, atau tingkat capaian sebesar 100%.
28. Jumlah jasa perizinan dan sertifikasi yang tersedia, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 3 Unit dari target 15 Unit, atau tingkat capaian sebesar 20%.
29. Jumlah alat angkut darat bermotor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 2 Unit dari target 16 Unit, atau tingkat capaian sebesar 13%.
30. Jumlah meja kerja/rapat yang mendapat pemeliharaan, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 0 Unit dari target 20 Unit, atau tingkat capaian sebesar 0%.
31. Jumlah komputer yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 1 Jenis dari target 4 Jenis, atau tingkat capaian sebesar 25%.
32. Jumlah alat kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 Jenis dari target 7 Jenis, atau tingkat capaian sebesar 0%.
33. Jumlah alat rumah tangga yang mendapat perawatan rutin/berkala, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 Unit dari target 40 Unit, atau tingkat capaian sebesar 0%.
34. Jumlah alat studio yang mendapat perawatan rutin/berkala, dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 0 Jenis dari target 1 Jenis, atau tingkat capaian sebesar 0%.

Program ini terdiri dari 6 kegiatan, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 50% dengan predikat kinerja Rendah dengan serapan anggaran sebesar Rp 3.886.870.697 atau 41% dari pagu sebesar Rp. 9.514.576.025,-.

Secara umum, tidak terdapat kendala teknis yang berarti dalam pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, adapun penyebab keterlambatan pelaksanaan kegiatan disebabkan karena kegiatan yang sejak awal telah di atur

jadwal pelaksanaannya mengalami pergeseran bahkan dihilangkan karena terjadinya pandemi COVID-19 yang hampir merata di seluruh dunia sehingga anggaran yang ada dialihkan untuk penanganannya. Hal ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2021 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) serta pengamanan daya beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Dalam keputusan tersebut Penyesuaian khusus pada Belanja Daerah dirasionalisasi di Belanja Barang/Jasa sekurang-kurangnya 50% pada kebijakan APBD Pokok sebelumnya.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab masih rendahnya capaian target kinerja program utama dan program pendukung/penunjang meliputi: menjalin koordinasi yang baik dengan SKPD atau instansi terkait, bertindak berdasarkan kerangka acuan kerja (KAK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan.

Tabel E.81 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2021

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | SATUAN | TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2021-2026 | | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD/RENJA SKPD TAHUN 2020 | | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021) | | | REALISASI KINERJA TRIWULAN | | | | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2020) (Tahun n-1) | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD TAHUN n-1 (%) | | REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RPKD) | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | KET. | | | | |
|----|-----------------|---|---|---------|-------------------------------------|-----|--|----------------|---|---------------|---------------------|----------------------------|-----|---------------|----|---|---------------|---|------|---|----|--|--|-----------------------|------|-----------|--|----------------|--|
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. (RENJA) | Rp. (DPA PARSIAL 2) | I | | II | | III | | IV | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/8 * 100% | | | | 15 = 7+13 | | 16 = 15/6*100% | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | 26.841.152.825 | 39.793.121.100 | | 1.946.246.452 | 5.333.964.325 | | | | | 7.280.210.777 | | | | | | | | | | | | |
| | 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 9.514.576.025 | 9.514.576.025 | | 1.530.776.644 | 2.272.374.053 | | | | | 3.803.150.697 | | | | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah | % | | | | 100 | 125.088.000 | 125.088.000 | 25 | - | 25 | 18.301.000 | | | 50 | 18.301.000 | 50% | 15% | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen RENJA perubahan SKPD yang disusun | dokumen | | | | 1 | 31.519.000 | 31.519.000 | 0 | - | 1 | 10.210.000 | | | 1 | 10.210.000 | 100% | 32% | | | | | | | | | |
| | | | Tersedianya dokumen RENJA SKPD yang disusun | dokumen | | | | 1 | | | 1 | | 0 | | | | 1 | | 100% | | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya dokumen RKA SKPD | dokumen | | | | 1 | 8.351.000 | 8.351.000 | 1 | - | 0 | 8.091.000 | | | 1 | 8.091.000 | 100% | 97% | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD | dokumen | | | | 1 | 10.761.000 | 10.761.000 | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Tersedianya dokumen DPA SKPD | dokumen | | | | 1 | 9.941.000 | 9.941.000 | 1 | - | 0 | - | | | 1 | - | 100% | 0% | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD | dokumen | | | | 1 | 9.691.000 | 9.691.000 | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | dokumen | | | | 1 | 43.691.000 | 43.691.000 | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | | | | | | | | | |
| | | | Tersedianya Laporan Semesteran Barang Milik Daerah | dokumen | | | | 1 | | | 0 | | 0 | | | | - | | 0% | | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perjanjian kinerja SKPD yang disusun | dokumen | | | | 1 | 11.134.000 | 11.134.000 | 1 | - | 0 | - | | | 1 | - | 100% | 0% | | | | | | | | | |
| | | | Tersedianya rencana kerja SKPD yang dikendalikan dan dievaluasi | dokumen | | | | 1 | | | 0 | | 0 | | | | - | | 0% | | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan) | % | | | | 100 | 7.437.697.860 | 7.437.697.860 | 25 | 1.427.305.400 | 25 | 1.921.975.024 | | | 50 | 3.349.280.424 | 50% | 45% | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai menerima gaji / tunjangan | bulan | | | | 12 | 7.041.777.860 | 7.041.777.860 | 3 | 1.368.115.400 | 3 | 1.809.312.024 | | | 6 | 3.177.427.424 | 50% | 45% | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah jasa pengelolaan keuangan SKPD | orang | | | | 7 | 300.120.000 | 300.120.000 | 7 | 38.190.000 | 7 | 87.540.000 | | | 7 | 125.730.000 | 100% | 42% | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan semesteran dan laporan akhir tahun serta perhitungan penyusutan aset SKPD yang tersusun | dokumen | | | | 2 | 95.800.000 | 95.800.000 | 2 | 21.000.000 | 2 | 25.123.000 | | | 2 | 46.123.000 | 100% | 48% | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan) | % | | | | 90 | 317.000.000 | 317.000.000 | 25 | - | 25 | 83.720.000 | | | 50 | 83.720.000 | 56% | 26% | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan | pasang | | | | 145 | 87.000.000 | 87.000.000 | 0 | - | 100 | 83.720.000 | | | 100 | 83.720.000 | 69% | 96% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------|--|------|-------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|---|-----|-------------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.16.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | orang | | 12 | 230.000.000 | 230.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0% | 0% | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan) | % | | 90 | 604.961.265 | 604.961.265 | 10 | 2.870.000 | 30 | 50.695.956 | | | 40 | 53.565.956 | 44% | 9% | | | | | | | |
| 2.16.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat studio yang diadakan | unit | | 0 | 139.281.250 | 139.281.250 | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | | | | | | | |
| | | Jumlah komputer yang diadakan | jenis | | 3 | | | 0 | 0 | - | 0% | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah alat kantor yang diadakan | jenis | | 6 | | | 0 | 0 | - | 0% | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah alat rumah tangga yang diadakan | unit | | 11 | 4.688.000 | 4.688.000 | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | | | | | | | |
| 2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia | jenis | | 25 | 198.263.015 | 198.263.015 | 0 | - | 5 | 20.717.000 | | | 5 | 20.717.000 | 20% | 10% | | | | | | | |
| 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia | jenis | | 7 | 43.669.000 | 43.669.000 | 0 | - | 1 | 5.008.000 | | | 1 | 5.008.000 | 14% | 11% | | | | | | | |
| 2.16.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang tersedia | jenis | | 4 | 17.560.000 | 17.560.000 | 1 | 2.870.000 | 1 | 2.870.000 | | | 2 | 5.740.000 | 50% | 33% | | | | | | | |
| 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan | kali | | 62 | 201.500.000 | 201.500.000 | 0 | - | 2 | 22.100.956 | | | 2 | 22.100.956 | 3% | 11% | | | | | | | |
| 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan) | % | | 90 | 656.557.600 | 656.557.600 | 15 | 100.601.244 | 15 | 118.317.623 | | | 30 | 218.918.867 | 33% | 33% | | | | | | | |
| 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tersedia | surat | | 1000 | 355.050.600 | 355.050.600 | 300 | 76.166.912 | 450 | 87.438.676 | | | 750 | 163.605.588 | 75% | 46% | | | | | | | |
| | | Terhubungnya jasa pengiriman surat | bulan | | 12 | | | 3 | | | | 3 | 6 | 50% | | | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah kebutuhan jasa listrik, telepon, dan air yang tersedia | jenis | | 3 | 268.716.000 | 268.716.000 | 3 | 19.934.332 | 3 | 26.378.947 | | | 3 | 46.313.279 | 100% | 17% | | | | | | | |
| 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia | jenis | | 4 | 32.791.000 | 32.791.000 | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | | | 4 | 30.878.947 | 100% | 94% | | | | | | | |
| 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | % | | 90 | 373.271.300 | 373.271.300 | 5 | - | 10 | 79.364.450 | | | 15 | 79.364.450 | 17% | 21% | | | | | | | |
| 2.16.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | unit | | 1 | 17.375.400 | 17.375.400 | 0 | - | 1 | 6.375.600 | | | 1 | 6.375.600 | 100% | 37% | | | | | | | |
| 2.16.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jasa perizinan dan sertifikasi yang tersedia | unit | | 15 | 265.115.900 | 265.115.900 | 0 | - | 3 | 66.196.350 | | | 3 | 66.196.350 | 20% | 25% | | | | | | | |
| | | Jumlah alat angkut darat bermotor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | unit | | 16 | | | 0 | | | | 2 | 2 | 13% | | | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah meja kerja/rapat yang mendapat pemeliharaan | unit | | 20 | 4.960.000 | 4.960.000 | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | | | | | | | |
| 2.16.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah bangunan gedung tempat kerja yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala | jenis | | 0 | 6.270.000 | 6.270.000 | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0% | 0% | | | | | | | |
| 2.16.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan | Jumlah komputer yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala | jenis | | 4 | 79.550.000 | 79.550.000 | 0 | - | 1 | 6.792.500 | | | 1 | 6.792.500 | 25% | 9% | | | | | | | |
| | | Jumlah alat kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala | jenis | | 7 | | | 0 | | | | 0 | - | 0% | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah alat rumah tangga yang mendapat perawatan rutin/berkala | unit | | 40 | | | 0 | | | | 0 | - | 0% | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah alat studio yang mendapat perawatan rutin/berkala | jenis | | 1 | | | 0 | | | | 0 | - | 0% | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | R | R | | | | | | | |
|--|---|---|---------|--|--|--|---|-------------|-------------|---|------------|---|--|--|------------|---|------|-----|------------|------|-----|--|--|--|--|
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | | | 117.817.200 | 204.164.375 | | 14.281.296 | | | | 22.560.292 | | | | 36.841.588 | | | | | | |
| 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | level | | | | 1 | 117.817.200 | 204.164.375 | 1 | 14.281.296 | 1 | | | 22.560.292 | | | | 36.841.588 | 100% | 18% | | | | |
| 2.21.02.2.01.01 | Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah dokumen keamanan informasi | dokumen | | | | 1 | 8.349.000 | 8.349.000 | 0 | - | 0 | | | 3.379.000 | | | | 3.379.000 | 0% | 40% | | | | |
| 2.21.02.2.01.03 | Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik | Jumlah layanan keamanan informasi | layanan | | | | 3 | 109.468.200 | 195.815.375 | 0 | 14.281.296 | 1 | | | 19.181.292 | | | | 33.462.588 | 33% | 17% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 100% | 18% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | R | R | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | 43% | 23% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | R | R | | | | | | | |

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Makassar



Denny Hidayat, ST., M.Si.
Pangkat : Pembina
Nip. : 19750505 200003 1 009

Dievaluasi,
Makassar,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Daerah
Kota Makassar

HelmyBudiman, S.STP., M.M.
Pangkat : Pembina
Nip. : 19840513 200212 1 002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini pemerintah kota Makassar telah menetapkan visi misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2022-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota Makassar Makassar.

Visi Kota Makassar Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Sombere' dan Smart City" dengan Imunitas Kuat untuk Semua

1. Kota Dunia : Makassar sebagai kota yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional (global chain) terhadap arus orang/barang, jasa, dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur dan pelayanan public yang unggul bagi kesejahteraan warga kota Makassar.
2. Sombere dan Smart City : perwujudan dari nilai nilai luhur budaya etnis “ Bugis Makassar “ yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere berkaitan dengan perangkat hati sedangkan smart city berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Diharapkan dengan Sombere dan Smart City menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya local
3. Imunitas kuat : perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi guncangan di masa depan guna mendorong pembangunan berkelanjutan serta tangguh terhadap ancaman bencana termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan.
4. Untuk semua : Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur jenis kelamin status social dan kemampuan diri sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas social serta pemerataan pertumbuhan.

Berdasarkan rumusan visi pemerintah Kota Makassar, maka misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik kelas Dunia bersih dari Indikasi Korupsi.
2. Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk Semua.
3. Restorasi Ruang Kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia "Sombere & Smart" City untuk Semua.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis War Room Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika

Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika selaras dan siap mendukung misi III Restorasi Ruang Kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia "Sombere & Smart" City untuk Semua.

Keterkaitan antara misi Pemerintah Kota Makassar dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Kota Makassar
2. Peningkatan Pengunjung Tahunan Pada Website Pemerintah Kota Makassar
3. Peningkatan Data Tahunan Yang Ter-Update Pada Open Data Pemerintah Kota Makassar
4. Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Yang Terhubung dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo
5. Melaksanakan layanan publik Yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
6. Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan

7. Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah
8. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
9. Melaksanakan keamanan informasi pemerintah

Adapun permasalahan yang dapat menghambat ketercapaian misi ke-III dijabarkan sebagai berikut berikut ini :

1. Terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Masih kurang terpenuhi pelayanan, diukur dari Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)
 - Kurangnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
 - ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah belum tepat waktu
 - Kurangnya kesempatan pendidikan dan pelatihan ASN Perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas
2. Terhadap Program Informasi Dan Komunikasi
 - Masih terbatasnya masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kota Makassar
 - Kurangnya minat dan bantuan dana Untuk peningkatan pengunjung pertahun pada website pemerintah Kota Makassar
 - Masih terbatasnya peningkatan data pertahun yang ter-Update pada open data Pemerintah Kota Makassar
3. Terhadap Program Aplikasi Informatika
 - Terbatasnya sumber daya manusia pengelola terhadap Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo
 - Belum maksimalnya pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
4. Terhadap Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Belum sepenuhnya Organisasi Perangkat Daerah (Opd) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan
 - Belum merata Organisasi Perangkat Daerah (Opd) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
 - Masih kurangnya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi
5. Terhadap program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
- Masih rendahnya nilai Indeks keamanan Informasi (Indeks KAMI) sistem elektronik yang di gunakan oleh Pemerintah Kota Makassar.
 - Belum optimalnya penggunaan Jaring Komunikasi Sandi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam komunikasi perangkat daerah.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2022, di mana proses awal Renja 2022 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 kemudian mengalami perubahan/pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selanjutnya, proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, proses ini dilakukan sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan yang diusulkan, apakah memang perlu dilaksanakan atau tidak, namun pada dasarnya program dan kegiatan yang diusulkan merupakan kebutuhan dan skala prioritas untuk dilaksanakan.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD (Lihat Tabel T-C.31) yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan dapat diuraikan bahwa secara umum, usulan program dan kegiatan dalam Renja tidak berbeda dengan rancangan awal RKPD.

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut:

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

| KODE | | | | RANCANGAN AWAL RKP | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|---|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------------|---------------|--|
| KODE ORGANISASI | | | | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET INDIKATOR | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET INDIKATOR | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | KET | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR | | | | | 51.200.013.300 | | | | 51.200.013.300 | | |
| 2 | 16 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | 49.225.013.300 | | | | 49.225.013.300 | | |
| 2 | 16 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 10.274.000.000 | | | 10.274.000.000 | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 713.000.000 | | | | 713.000.000 | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Makassar | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pokok dan Perubahan | 2 dokumen | 170.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pokok dan Perubahan | 2 dokumen | 170.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Makassar | Tersedianya Dokumen RKA SKPD | 1 dokumen | 56.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya Dokumen RKA SKPD | 1 dokumen | 56.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Makassar | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD | 1 dokumen | 56.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD | 1 dokumen | 56.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Makassar | Tersedianya Dokumen DPA SKPD | 1 dokumen | 60.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya Dokumen DPA SKPD | 1 dokumen | 60.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Makassar | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD | 1 dokumen | 60.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD | 1 dokumen | 60.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Makassar | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran | 1 dokumen | 56.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran | 1 dokumen | 56.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Makassar | Tersedianya Dokumen Lakip, Evaluasi Renja dan Sakip | 3 dokumen | 255.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya Dokumen Lakip, Evaluasi Renja dan Sakip | 3 dokumen | 255.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 7.463.000.000 | | | | 7.463.000.000 | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Makassar | Jumlah pegawai menerima gaji/tunjangan | 12 Bulan | 7.060.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah pegawai menerima gaji/tunjangan | 12 Bulan | 7.060.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Makassar | Jumlah jasa Pengetotaan keuangan SKPD | 7 Orang | 305.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah jasa Pengetotaan keuangan SKPD | 7 Orang | 305.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD | Makassar | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Asset SKPD yang tersusun | 2 Dokumen | 98.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Asset SKPD yang tersusun | 2 Dokumen | 98.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 197.000.000 | | | | 197.000.000 | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Makassar | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan | 160 Pasang | 97.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan | 160 Pasang | 97.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Makassar | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 12 Orang | 100.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 12 Orang | 100.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 615.000.000 | | | | 615.000.000 | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Makassar | Jumlah alat kantor yang diadakan | 6 Jenis | 100.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah alat kantor yang diadakan | 6 Jenis | 100.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Makassar | Jumlah alat kantor yang diadakan | 3 Jenis | 20.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah alat kantor yang diadakan | 3 Jenis | 20.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik | Makassar | Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia | 10 Jenis | 200.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia | 10 Jenis | 200.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Makassar | Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia | 10 Jenis | 50.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia | 10 Jenis | 50.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Makassar | Jumlah bahan bacaan yang tersedia | 4 Jenis | 20.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah bahan bacaan yang tersedia | 4 Jenis | 20.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Makassar | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan | 62 Kali | 225.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan | 62 Kali | 225.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 675.000.000 | | | | 675.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|---|--|---|---|---|-----------------------|----------|---|---|-------------|-----------------------|--|
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Makassar | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tersedia | 1000 Surat | 365.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tersedia | 1000 Surat | 365.000.000 | |
| | | | | | | | Terhubungnya jasa pengiriman Surat | 12 Bulan | | | | Terhubungnya jasa pengiriman Surat | 12 Bulan | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Makassar | Jumlah kebutuhan jasa listrik telepon dan air yang tersedia | 3 Jenis | 275.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah kebutuhan jasa listrik telepon dan air yang tersedia | 3 Jenis | 275.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelan-anan Umum Kantor | Makassar | Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia | 4 Jenis | 35.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia | 4 Jenis | 35.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 611.000.000 | | | | | 611.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Makassar | Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | 1 Unit | 25.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | 1 Unit | 25.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Makassar | Jumlah alat angkut darat bermotor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | 16 unit | 290.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah alat angkut darat bermotor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | 16 unit | 290.000.000 | |
| | | | | Makassar | | Jumlah jasa perizinan dan sertifikasi yang tersedia | 15 unit | PAD | | Makassar | Jumlah jasa perizinan dan sertifikasi yang tersedia | 15 unit | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Makassar | Jumlah meja kerja/rapat yang mendapat pemeliharaan | 20 unit | 6.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah meja kerja/rapat yang mendapat pemeliharaan | 20 unit | 6.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Makassar | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan gedung tempat kerja | 3 Jenis | 195.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan gedung tempat kerja | 3 Jenis | 195.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Makassar | Jumlah alat kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala | 7 jenis | 95.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah alat kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala | 7 jenis | 95.000.000 | |
| | | | | Jumlah alat rumah tangga yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | | | 40 Unit | Jumlah alat rumah tangga yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | | | | 40 Unit | | | |
| | | | | Jumlah alat studio yang mendapat perawatan rutin/berkala | | | 1 Jenis | Jumlah alat studio yang mendapat perawatan rutin/berkala | | | | 1 Jenis | | | |
| | | | | Jumlah Computer/alat komputer yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala | | | 4 Jenis | Jumlah Computer/alat komputer yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala | | | | 4 Jenis | | | |
| 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | 14.600.000.000 | | | | | 14.600.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 14.600.000.000 | | | | | 14.600.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Makassar | Tersedianya kebijakan publik di bidang informasi dan komunikasi publik | 2 Dokumen | 350.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya kebijakan publik di bidang informasi dan komunikasi publik | 2 Dokumen | 350.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Makassar | Tersedianya pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah kota dan komunikasi publik | 10 Kegiatan | 800.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah kota dan komunikasi publik | 10 Kegiatan | 800.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Makassar | Tersedianya monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas pemerintah kota melalui informasi dan komunikasi publik | 5 Dokumen | 500.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas pemerintah kota melalui informasi dan komunikasi publik | 5 Dokumen | 500.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Makassar | Tersedianya konten dan media komunikasi publik | 12 Kegiatan | 500.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya konten dan media komunikasi publik | 12 Kegiatan | 500.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Makassar | Tersedianya media komunikasi publik | 12 Kegiatan | 500.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya media komunikasi publik | 12 Kegiatan | 500.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | Makassar | Tersedianya layanan informasi publik | 12 Kegiatan | 500.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya layanan informasi publik | 12 Kegiatan | 500.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 07 | Layanan Hubungan media | Makassar | Tersedianya Layanan Hubungan media | 12 Kegiatan | 7.000.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya Layanan Hubungan media | 12 Kegiatan | 7.000.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Makassar | Tersedianya kemitraan dengan pemangku kepentingan | 5 Kegiatan | 400.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya kemitraan dengan pemangku kepentingan | 5 Kegiatan | 400.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 09 | Manajemen Komunikasi Krisis | Makassar | Tersedianya manajemen komunikasi krisis | 1 Kegiatan | 100.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya manajemen komunikasi krisis | 1 Kegiatan | 100.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Makassar | Tersedianya kapasitas sumber daya komunikasi publik | 1 Kegiatan | 500.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya kapasitas sumber daya komunikasi publik | 1 Kegiatan | 500.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|--|---|----------|---|--|----------------|-----------------------|----------|---|-------------|----------------|-----------------------|--|
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Makassar | Tersedianya tata kelola komisi informasi daerah | 2 Kegiatan | 100.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya tata kelola komisi informasi daerah | 2 Kegiatan | 100.000.000 | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Makassar | Tersedianya humas, media, dan hubungan kemitraan komunitas | 12 Kegiatan | 3.000.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya humas, media, dan hubungan kemitraan komunitas | 12 Kegiatan | 3.000.000.000 | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Makassar | Tersedianya sarana pendukung bidang informasi dan komunikasi publik | 5 Item | 350.000.000 | PAD | Makassar | Tersedianya sarana pendukung bidang informasi dan komunikasi publik | 5 Item | 350.000.000 | | |
| 2 | 16 | 03 | | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | | | | | 24.351.013.300 | | | | | 24.351.013.300 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan e-governmen DI Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 24.351.013.300 | | | | | 24.351.013.300 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Makassar | | | 150.000.000 | PAD | Makassar | | | 150.000.000 | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Makassar | Persentasi Layanan Publik Yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi | 90 persen | 3.041.474.800 | PAD | Makassar | Persentasi Layanan Publik Yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi | 90 persen | 3.041.474.800 | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 06 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informati Elektronik | Makassar | | | 1.250.000.000 | PAD | Makassar | | | 1.250.000.000 | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Makassar | Ketersedian Infrastruktur yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan Pemerintah Kota Makassar | 8 Paket | 8.871.538.500 | PAD | Makassar | Ketersedian Infrastruktur yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan Pemerintah Kota Makassar | 8 Paket | 8.871.538.500 | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Makassar | | | 250.000.000 | PAD | Makassar | | | 250.000.000 | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Makassar | | | 150.000.000 | PAD | Makassar | | | 150.000.000 | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Makassar | | | 10.638.000.000 | PAD | Makassar | | | 10.638.000.000 | | |
| 2 | 16 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | 1.085.000.000 | | | | | 1.085.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | 1.085.000.000 | | | | | 1.085.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.085.000.000 | | | | | 1.085.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Sektoral | Makassar | Persentase ketersediaan data dalam bentuk Potret Kota Makassar | 1 dokumen | 350.000.000 | PAD | Makassar | Persentase ketersediaan data dalam bentuk Potret Kota Makassar | 1 dokumen | 350.000.000 | | |
| | | | | Persentase ketersediaan data dalam bentuk Profil | | | 1 dokumen | Persentase ketersediaan data dalam bentuk Profil | | | | 1 dokumen | | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Makassar | Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM Statistik Sektoral | 400 orang | 250.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM Statistik Sektoral | 400 orang | 250.000.000 | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Makassar | Persentase ketersediaan metadata statistik sek toral | 1 Portal | 250.000.000 | PAD | Makassar | Persentase ketersediaan metadata statistik sek toral | 1 Portal | 250.000.000 | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Makassar | Jumlah peserta otorisasi statistik Sektoral | 200 Orang | 235.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah peserta otorisasi statistik Sektoral | 200 Orang | 235.000.000 | | |
| 2 | 16 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | 890.000.000 | | | | | 890.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | 890.000.000 | | | | | 890.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 690.000.000 | | | | | 690.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Inform as dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Makassar | Jumlah Kebjkan tata Kelola Keamana Informasi | 1 Dokumen | 50.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah Kebjkan tata Kelola Keamana Informasi | 1 Dokumen | 50.000.000 | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Makassar | Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah Yang Mengikuti Asistensi C-SIRT | 120 Orang | 200.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah Yang Mengikuti Asistensi C-SIRT | 120 Orang | 200.000.000 | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Makassar | Jumlah Peserta Bimtek Sistem Manajemen Keamanan Informasi | 50 Orang | 200.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah Peserta Bimtek Sistem Manajemen Keamanan Informasi | 50 Orang | 200.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|----------|--------------------------------------|-----------|--------------------|-----|----------|--------------------------------------|-----------|--------------------|--|
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Makassar | Jumlah Layanan Keamanan Informasi | 4 Layanan | 240.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah Layanan Keamanan Informasi | 4 Layanan | 240.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.02 | | Penetapan Pola Hubungan | | | | 200.000.000 | | | | | 200.000.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.02 | 01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Makassar | Jumlah Jaring Komunikasi Sandi (JKS) | 1 JKS | 200.000.000 | PAD | Makassar | Jumlah Jaring Komunikasi Sandi (JKS) | 1 JKS | 200.000.000 | |

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Permasalahan di Bidang Komunikasi dan Informatika semakin lama semakin kompleks, oleh karena itu diperlukan masukan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat, LSM, Institusi Pendidikan, dan Instansi Pemerintah lainnya.

Ada beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Usulan ini merupakan hasil Pelaksanaan Musrembang. Usulan ini dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD seperti ketersediaan CCTV dan akses Wifi gratis. Usulan program dan kegiatan masyarakat terdapat pada Tabel T-C.32 berikut.

Tabel T-C.32 Usulan Kelurahan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2022

| No | Pekerjaan | Sifat | Usulan | | | | Hasil Verifikasi | | | | | |
|----|--|-------|--|---------------|-------------------|------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|--|
| | | | Lokasi Detail | Volume Usulan | Pagu Usulan (Rp.) | Keterangan | Status Kecamatan | Status SKPD | SKPD | Pagu Yang Disetujui (Rp.) | Volume Disetujui | Alasan Diterima/Ditolak |
| 1 | Sarana dan prasarana pemasangan CCTV 10 unit, di jl kalimantan komp pu ada 2 unit Rw01, di jl kalimantan komp pu lorong sehat ada 1 unit Rw01, di jalan kalimantan lorong ddi ada 3 unit RW01, di jl sanani ada 2 unit Rw02 dan di jalan nusantara baru ada 2 unit Rw02 di sebabkan maraknya terjadi perncurian dan perkelahian, perkiraan anggaran Rp. 50.000.000,- | | Ujung Tanah, Kota Makassar | 10 Titik | 50.000.000 | | Diteruskan | Belum Diakomodir | Dinas Komunikasi dan Informatika | 290.000.000 | 10 Titik | usulan ini dapat diakomodir apabila adanya tambahan pagu diluar dari pagu SKDP kominfo dari Tim TPAD |
| 2 | Pemasangan CCTV untuk jalan Protokol dan Penghubung Volume : 29 Titik dan Nilai Usulan : 145.000.000 | | Jalan Banda, Butung, Sarappo, Dr.Wahidin sudiro husodo dan sulawesi, Kota Makassar | 29 Titik | 145.000.000 | | Diteruskan | Belum Diakomodir | Dinas Komunikasi dan Informatika | 841.000.000 | 29 Titik | usulan ini dapat diakomodir apabila adanya tambahan pagu diluar dari pagu SKDP kominfo dari Tim TPAD |
| 3 | Pemasangan CCTV dilokasi yang terjadi tindak kriminal atau kejahatan lainnya lokasi dilorong RW. 01, RW. 02 dan RW. 03 Kelurahan Pattingalloang Baru, Kota Makassar Rp. 75.000.000,- | | Lorong di RW. 01, RW. 02 dan RW. 03 Kelurahan Pattingalloang Baru, Kota Makassar | 3 Titik | 75.000.000 | | Diteruskan | Belum Diakomodir | Dinas Komunikasi dan Informatika | 87.000.000 | 3 Titik | usulan ini dapat diakomodir apabila adanya tambahan pagu diluar dari pagu SKDP kominfo dari Tim TPAD |

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

Presiden Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus membajak momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet;
2. Mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis;
3. Mempercepat integrasi pusat data nasional;
4. Mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital; serta
5. Menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah:

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;

4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Untuk mengorkestrasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020 – 2024, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2021 diarahkan untuk:

1. Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services); dan
4. Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/e-commerce).

Berdasarkan arah kebijakan yang direncanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menjadi kewajiban bagi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung transformasi digital, yang bertujuan untuk akselerasi transformasi digital sistem pemerintahan, mewujudkan public service yang efisien dan cepat terutama bidang pendidikan dan Kesehatan, mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan layanan bersama atau share service, serta layanan akses internet yang merata khususnya di daerah terpencil dapat terwujud

3.2 Telaahan Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Keamanan ruang siber turut dipengaruhi beberapa isu-isu strategis diantaranya meningkatnya penetrasi internet dalam berbagai aspek kehidupan dan bergulirnya revolusi industri 4.0 yang menimbulkan berbagai ancaman di ruang siber. Dua tahun pasca dibentuknya, BSSN mulai menata pengelolaan tugas dan fungsi sehingga ancaman keamanan siber dapat diminimalisir. Pencapaian kinerja BSSN 2018-2019 semakin menguatkan posisi BSSN yang bertekad untuk melayani seluruh pemangku kepentingan baik disektor pemerintah, Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN), dan ekonomi digital serta terus berusaha memenuhi harapan dari masyarakat untuk dapat menjaga stabilitas keamanan ruang siber.

Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna internet terbesar keempat di dunia, menghadapi peluang sekaligus ancaman besar dengan perkembangan teknologi digital dan internet baik dari dimensi sosial, politik, dan ekonomi, seperti provokasi politik, hoaks, SARA, ujaran kebencian, ideologi radikalisme, terorisme, hacking, pencurian data, penipuan daring, dan tindak kejahatan lainnya di ruang siber. Hal tersebut harus dapat diantisipasi, dicegah, dan ditangani untuk menjamin kedaulatan bangsa.

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang. Gelombang transformasi teknologi telah menjadikan seluruh warga dunia terhubung dalam sebuah 'desa global'. Perpaduan teknologi telekomunikasi, internet, dan penyiaran, telah mendorong munculnya infrastruktur jaringan pita lebar yang mendorong lahirnya ekonomi baru. Jaringan pita lebar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi dengan globalisasi ekonomi digital. Di sisi lain, keterhubungan dengan jaringan pita lebar global, memunculkan ancaman pada seluruh aset kritis. Keterhubungan global ini membentuk dunia siber dengan ciri interaksi daring. Keterhubungan daring memberi banyak kemudahan, sekaligus menghadirkan kerentanan dan ancaman baru. Virus serta malware dapat dengan mudah dikirimkan lewat internet yang akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada sistem dan kebocoran data.

Penetapan roadmap "Making Indonesia 4.0" dengan salah satu inisiatif lintas sektornya yaitu pembangunan infrastruktur digital nasional, memaksa Indonesia

untuk siap dalam memasuki era industry 4.0 dan implementasinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa bidang keamanan siber akan menjadi bagian penting dalam tatanan era revolusi Industri 4.0, dimana kejahatan siber semakin beragam dan berdampak masif secara nasional yang dapat mengancam kedaulatan bangsa.

Kegiatan prioritas nasional penguatan ketahanan dan keamanan siber dijabarkan ke dalam proyek-proyek prioritas nasional, dimana BSSN mengampu 4 (empat) proyek prioritas nasional dengan rincian proyek sebagai berikut:

1. Penguatan pengamanan infrastruktur siber
 - a. perluasan cakupan area national cybersecurity operation center.
 - b. pembangunan kapasitas national computer security incident response team.
 - c. pembangunan sistem monitoring pengendalian informasi.
 - d. penguatan national data center.
 - e. pembangunan infrastruktur voluntary vulnerability disclosure program.
 - f. pembangunan information sharing and analysis center.
2. Pembangunan dan penguatan computer emergency response team
 - a. pembentukan CSIRT pada sektor pemerintah.
 - b. pembentukan tim respon ancaman intelijen siber.
3. Pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber, kerjasama regional, bilateral dan multilateral bidang keamanan siber.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola keamanan SPBE pada K/L/D.
 - b. pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber.
 - c. penyelenggaraan program born to defence untuk sumber daya manusia pengelola keamanan siber sektor IIKN.
 - d. national cyber exercise drill test jumlah peserta yang mengikuti national cyber exercise drill test.
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang digital forensic.

Dari uraian di atas sudah sangat jelas peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengamankan dunia siber, dengan ikut berpartisipasi dengan menyediakan

Kebijakan, Regulasi, Insfrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal di bidang keamanan siber, terlebih melihat posisi Kota Makassar sebagai pintu gerbang atau pusat perekonomian di Wilayah Indonesia Timur.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (BPS)

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS untuk tahun 2020 – 2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Renstra BPS periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam Renstra BPS 2020 – 2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia (Statcap CERDAS).

Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia pada tanggal 12 juni 2019, Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia sendiri merupakan kebijakan tata kelola data dari pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, data-data tersebut juga mudah diakses dan dibagi pakai antara instansi pusat dan instansi daerah.

Pemerintah Kota Makassar khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen dalam memberikan data statistik yang akurat sesuai dengan tugasnya sebagai Walidata. Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan data statistik di Kota Makassar, diperlukan berbagai macam data pendukung yang akan memberikan informasi mengenai berbagai aspek meliputi data umum mencakup geografi, pemerintahan dan struktur organisasi, data sosial budaya, data sumber daya alam, data lingkungan hidup dan tata ruang, data infrastruktur, data pariwisata, data perhubungan, data kesehatan, pendidikan, investasi dan pendapatan daerah serta data politik. Informasi data statistik ini selain sebagai bahan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan selama ini, juga sebagai bahan masukan penetapan kebijakan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kota Makassar tahun mendatang. Selanjutnya dalam penyusunan Statistik khususnya Data Sektoral Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Perangkat daerah terkait dalam pengambilan data.

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja RKPD

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Makassar. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Makassar.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK yang terstandarisasi dalam rangka Implementasi Smart City;
2. Mewujudkan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau E-Government.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar tahun 2022 adalah:

1. Terwujudnya Jaringan Internet yang aman dan handal di Pemerintah Kota Makassar;
2. Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Makassar;
3. Terwujudnya layanan keamanan informasi di Pemerintah Kota Makassar;
4. Meningkatnya Kesadaran Keamanan Informasi di Pemerintah Kota Makassar.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Beserta Indikator sebagai berikut.

Tabel T-C.25 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

| Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun | | | | |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tujuan 1: Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK yang terstandarisasi dalam rangka Implementasi Smart City | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| Sasaran 1.1: Terwujudnya Jaringan Internet yang aman dan handal di Pemerintah Kota Makassar | Cakupan Layanan Bandwidth internet 20 Mbps di pemerintah Kota Makassar | 85% | 87% | 89% | 91% | 93% |
| Sasaran 1.2: Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Makassar | Cakupan Layanan Pemerintah Kota Makassar Yang Terdigitalisasi | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| Tujuan 2: Mewujudkan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau E-Government | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | 170 | 200 | 240 | 280 | 320 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sasaran 2.1: Terwujudnya layanan keamanan informasi di Pemerintah Kota Makassar | Cakupan Sistem Elektronik Yang Telah Dilakukan Pengujian Kerentanan dan Penilaian Resiko | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Sasaran 1.2: Meningkatnya Kesadaran Keamanan Informasi di Pemerintah Kota Makassar | Level Kesadaran Keamanan Informasi | 70% | 73% | 76% | 79% | 81% |

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan sebagai acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar tahun 2022 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi tujuan organisasi untuk mendanai 5 Program, 13 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

SKPD

- 2) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - 2) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 3) Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
 - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 6) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 7) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
 - 8) Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
 - 9) Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis
 - 10) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 11) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah
 - 12) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - 13) Sub Kegiatan Sub Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Aplikasi Informatika
 - a. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - 4) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - 6) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 7) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - 3) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - 4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik
 - 5) Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Daerah
 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022

| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI DETAIL | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 (N) | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 (N+1) | | | |
|---|---|---------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------|---|------------------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | 43.995.000.000 | | | | 45.439.615.830 | | |
| 2 | 16 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 11.239.304.900 | | | 90% | 11.801.270.145 | | |
| | | | | | 100% | | | 100% | | | |
| | | | | | 90% | | | 90% | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 315.449.500 | | 100% | 331.221.975 | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Makassar | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | 2 Dokumen | 100.293.000 | APBD | 2 Dokumen | 105.307.650 |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kota Makassar | Jumlah dokumen RKA -SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 16.370.000 | APBD | 1 Dokumen | 17.188.500 |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kota Makassar | Jumlah dokumen perubahan RKA -SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 15.031.000 | APBD | 1 Dokumen | 15.782.550 |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kota Makassar | Jumlah dokumen DPA -SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 16.629.000 | APBD | 1 Dokumen | 17.460.450 |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kota Makassar | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 16.629.000 | APBD | 1 Dokumen | 17.460.450 |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 06 Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Makassar | Jumlah Koordinasi dan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 47.652.000 | APBD | 1 Dokumen | 50.034.600 |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Makassar | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | 1 Dokumen | 102.845.500 | APBD | 1 Dokumen | 107.987.775 |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 6.997.147.998 | | 100% | 7.347.005.398 |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Makassar | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan | 48 ASN | 6.305.511.998 | APBD | 50 ASN | 6.620.787.598 |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota Makassar | Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan yang disediakan | 18 Orang | 539.600.000 | APBD | 18 Orang | 566.580.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kota Makassar | Persentase Laporan Pertanggung Jawaban yang tersedian | 100% | 152.036.000 | APBD | 100% | 159.637.800 |
| 2 | 16 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat | 0% | - | | 70% | - |
| 2 | 16 | 01 | 2.03 | 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Makassar | Jumlah dokumen perencanaan yang di buat | 0 Dokumen | - | APBD | 0 Dokumen | - |
| 2 | 16 | 01 | 2.03 | 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Makassar | Persentase Gedung Kantor | 0 Gedung | - | APBD | 0 Gedung | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---------------|---|--------------------|----------------------|------|--------------------|----------------------|
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 364.500.000 | | 100% | 382.725.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kota Makassar | Jumlah Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya | 150 Pasang Pakaian | 112.500.000 | APBD | 155 Pasang Pakaian | 118.125.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kota Makassar | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 13 Orang | 252.000.000 | APBD | 14 Orang | 264.600.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 1.861.558.018 | | 100% | 1.954.635.919 |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Makassar | jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 63 Buah | 1.362.084.125 | APBD | 73 Buah | 1.430.188.331 |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Makassar | Jumlah bulan Bahan Logistik Kantor yang tersedia | 12 Bulan | 156.015.393 | APBD | 12 Bulan | 163.816.163 |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Kota Makassar | Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan | 11.520 Lembar | 40.368.500 | APBD | 11.520 Lembar | 42.386.925 |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota Makassar | Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia | 202 Eksemplar | 19.090.000 | APBD | 202 Eksemplar | 20.044.500 |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Makassar | Jumlah Perjalanan Dinas Yang Tersedia | 29 Orang | 284.000.000 | APBD | 29 Orang | 298.200.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 480.000.000 | | 100% | 504.000.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Makassar | Jumlah kendaraan Dinas Jabatan | 0 Unit | - | APBD | 0 Unit | - |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Makassar | Jumlah kendaraan Dinas Operasional Lapangan | 1 Unit | 480.000.000 | APBD | 1 Unit | 504.000.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 677.248.384 | | 100% | 711.110.803 |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Makassar | Jumlah Tenaga Honorer Sekertariat yang mendapatkan Gaji | 17 Orang | 357.677.000 | APBD | 17 Orang | 375.560.850 |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Makassar | Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia | 3 Jenis | 280.968.384 | APBD | 3 Jenis | 295.016.803 |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Makassar | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | 2 Jasa | 38.603.000 | APBD | 2 Jasa | 40.533.150 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 543.401.000 | | 100% | 570.571.050 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Makassar | Jumlah alat angkut darat bermotor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | 1 Unit | 40.029.650 | APBD | 1 Unit | 42.031.133 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Makassar | Jumlah alat angkut darat bermotor Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | 15 Unit | 267.051.350 | APBD | 15 Unit | 280.403.918 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Kota Makassar | Jumlah meja kerja/rapat yang mendapat pemeliharaan | 37 Unit | 5.920.000 | APBD | 37 Unit | 6.216.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kota Makassar | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan gedung tempat kerja | 1 Jenis | 133.000.000 | APBD | 1 Jenis | 139.650.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Makassar | Jumlah alat kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala | 40 Unit | 97.400.000 | APBD | 40 Unit | 102.270.000 |
| 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR | 77,50% | 8.397.812.600 | | 80,00% | 8.817.703.230 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---------------|--|-----------------|-----------------------|------|--|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | | PERSENTASE PENINGKATAN PENGUNJUNG PERTAHUN PADA WEBSITE PEMERINTAH KOTA MAKASSAR | 50,00% | | | | 70,00% | |
| | | | | | | | PERSENTASE PENINGKATAN DATA PERTAHUN YANG TER-UPDATE PADA OPEN DATA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR | 21,56% | | | | 39,21% | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 8.397.812.600 | | | 100% | 8.817.703.230 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Kota Makassar | Jumlah Dokumen Dukungan Informasi Komunkasi Publik | 0 Dokumen | - | APBD | | 0 Dokumen | - |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Kota Makassar | Jumlah Buletin Pemerintah Kota Makassar | 4.800 Eksemplar | 519.800.000 | APBD | | 4.800 Eksemplar | 545.790.000 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Kota Makassar | Jumlah Kegiatan Dialog Kepala Daerah | 8 Dialog | 249.835.000 | APBD | | 8 Dialog | 262.326.750 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Kota Makassar | Jumlah portal Pemerintah Kota Makassar yang di kelola | 3 Portal | 530.305.000 | APBD | | 3 Portal | 556.820.250 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kota Makassar | Jumlah Video Promosi | 3 Video | 122.075.600 | APBD | | 5 Video | 128.179.380 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | Kota Makassar | Jumlah Pameran yang di ikuti | 4 pameran | 275.506.800 | APBD | | 4 pameran | 289.282.140 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 07 | Layanan Hubungan Media | Kota Makassar | Jumlah Kerjasama Media | 258 Paket | 5.049.644.200 | APBD | | 280 Paket | 5.302.126.410 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 08 | Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan | Kota Makassar | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 2 KIM | 225.165.000 | APBD | | 2 KIM | 236.423.250 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 09 | Manajemen Komunikasi Krisis | Kota Makassar | Jumlah Informasi positif Pemerintah Kota Makassar di Media Sosial | 700 Informasi | 144.251.200 | APBD | | 700 Informasi | 151.463.760 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Kota Makassar | Jumlah Bimtek Sumber Daya Komunikasi Publik | 8 Kegiatan | 343.991.800 | APBD | | 8 Kegiatan | 361.191.390 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 11 | penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah | Kota Makassar | Jumlah SDM PPID yang dibina | 800 Orang | 513.702.000 | APBD | | 800 Orang | 539.387.100 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Kota Makassar | Jumlah Koordinasi Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas | 8 Kegiatan | 423.536.000 | APBD | | 8 Kegiatan | 444.712.800 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 13 | Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Makassar | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik | 0 Sarana | - | APBD | | 0 Sarana | - |
| 2 | 16 | 03 | | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | | PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO MAKASSAR | 100% | 23.165.173.100 | | | 100% | 24.323.431.755 |
| | | | | | | | PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI | 32,87% | | | | 49,31% | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 23.165.173.100 | | | 100% | 24.323.431.755 |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Makassar | Persentase Tata Kelola IT dalam Pemerintahan | 100% | 125.637.000 | APBD | | 100% | 131.918.850 |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Kota Makassar | Persentase Operasional Pusat data Daerah | 90,00% | 3.512.153.600 | APBD | | 90,00% | 3.687.761.280 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---------------|---|-----------------|--------------------|------|-----------------|--------------------|
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 06 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Kota Makassar | Persentase integrasi data yang terverifikasi | 100% | 809.031.000 | APBD | 100% | 849.482.550 |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kota Makassar | Jumlah aplikasi yang terpublikasi dalam proses bisnis Pemerintah Daerah | 4 Aplikasi | 174.608.000 | APBD | 4 Aplikasi | 183.338.400 |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Kota Makassar | Jumlah regulasi yang diakomodasi | 2 Regulasi | 263.269.000 | APBD | 2 Regulasi | 276.432.450 |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Kota Makassar | Persentase peningkatan pengembangan dan pengelolaan Kota cerdas | 50% | 51.775.000 | APBD | 50% | 54.363.750 |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Kota Makassar | Jumlah Jenis Layanan Internet Yang Tersedia | 4 Jenis | 18.228.699.500 | APBD | 4 Jenis | 19.140.134.475 |
| | | | | | | | Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi Yang di Bangun | 0 Infrastruktur | | APBD | 2 Infrastruktur | |
| 2 | 20 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 58,82% | 473.534.000 | | 68,62% | 497.210.700 |
| | | | | | | | PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 49,00% | | | 58,62% | |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Pemerintah Kota Makassar | 58,82% | 473.534.000 | | 68,62% | 497.210.700 |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota Makassar | Jumlah dokumen statistik sektoral yang disusun | 1 Dokumen | 339.322.000 | APBD | 2 Dokumen | 356.288.100 |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Kota Makassar | Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan peningkatan SDM Statistik Sektoral | 0 SDM | - | APBD | 0 SDM | - |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Kota Makassar | Jumlah Portal Metadata Yang Tersedia | 1 Portal | 134.212.000 | APBD | 1 Portal | 140.922.600 |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 04 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik | Kota Makassar | jumlah SDM yang tersertifikasi dalam Peningkatan Kelembagaan Statistik Sektoral | 0 SDM | - | APBD | 0 SDM | - |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 05 | Pengembangan Infrastruktur | Kota Makassar | Jumlah Web data storage berbasis cloud | 0 Web Data | - | APBD | 0 Web Data | - |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 06 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Daerah | Kota Makassar | Jumlah Kegiatan penyelenggaraan kelembagaan statistik sektoral | 0 Kegiatan | - | APBD | 0 Kegiatan | - |
| 2 | 21 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH | 35,23% | 719.175.400 | | 40,91% | 755.134.170 |
| | | | | | | | PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGGUNAKAN SANDI DALAM KOMUNIKASI PERANGKAT DAERAH | 100% | | | 100% | |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | 45% | 622.550.400 | | 50% | 653.677.920 |
| | 21 | 02 | 2.01 | 01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Makassar | Jumlah Dokumen Keamanan Informasi | 1 Dokumen | 162.864.000 | APBD | 1 Dokumen | 171.007.200 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---------------|---|-------------|-------------------|------|--|-------------|--------------------|
| | 21 | 02 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Makassar | Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan pengetahuan di Bidang Keamanan Informasi | 0 Orang | - | APBD | | 0 Orang | - |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Kota Makassar | Jumlah Konten Peringatan Ancaman Keamanan dan Kerentanan Sistem Elektronik | 60 Konten | 349.392.000 | APBD | | 120 Konten | 366.861.600 |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 04 | Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | Kota Makassar | Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | 3 Layanan | 110.294.400 | APBD | | 3 Layanan | 115.809.120 |
| 2 | 21 | 02 | 2.02 | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah Dalam Jaringan Komunikasi Sandi | 100% | 96.625.000 | | | 100% | 101.456.250 |
| 2 | 21 | 02 | 2.02 | 01 | Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Makassar | Jumlah Jaringan Komunikasi Sandi Yang disediakan | 1 JKS | 96.625.000 | APBD | | 1 JKS | 101.456.250 |

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2021 merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meningkatkan pelayanan pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2022 mendatang. Rencana Kerja ini disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2022

5.1 Catatan Ketersediaan Anggaran

Program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahun 2022 diharapkan dapat dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar atau sumber dana lain yang dapat memacu terjalannya koordinasi dan mengendalikan kebijakan di pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Secara umum kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku:

1. Sustainable Development Goals (SDGs)
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2021-2016.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar serta dukungan dari pimpinan eksekutif dan legislative serta segenap aparatur daerah dan dukungan partisipasi masyarakat dan pemerhati bidang komunikasi dan informatika seras swasta sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan rencana kerja ini dalam rangka melaksanakan kewenangan pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehingga dapat berjalan lebih optimal dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) di Kota Makassar, maka diperlukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja
2. Diperlukan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara,

sehingga dapat terwujud mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah.

3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya yang makin intens dapat dilakukan melalui Pendidikan formal, pembinaan teknis, pelatihan, seminar, serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana yang lebih signifikan untuk menunjang penyelenggaraan administrasi dan teknis dalam lingkup kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
5. Perlu peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan hal-hal teknis Komunikasi dan Informatika.

Makassar, Oktober 2021

**Pt. Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Makassar**



Denny Hidayat
Pangkat: Pembina
Nip.: 19750505 200003 1-009